



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI

Jl. Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Km. 16 Desa Bukit Rawi, Kalimantan Tengah

Telp. 0811521799 (Sekretariat), 081258143898 (IGD)

Email: rsj_kalawaatei@kalteng.go.id, rsj_kalawaatei@yahoo.co.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar : Surat Tugas dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Nomor 095/SPT/BAK-2/RSJ-KA/VI/2023
2. Nama : 1. Anita Tristya Wenni, SH., MA
2. Rahma Noor Laila, S. Psi
3. NIP : 1. 19780215 200501 2 011
2. 19940512 202012 2 030
4. Pangkat/Gol : 1. Pembina / IVa
2. Penata Muda / IIIa
5. Jabatan : 1. Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian
2. Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja
6. Dalam rangka : Rapat Koordinasi PPID Kalimantan Tengah Tahun 2023 sekaligus Kaji Banding ke PPID Utama Provinsi Jawa Barat
7. Tanggal : 18 s/d 21 Juni 2023
8. Lokasi : Gedung Sate & Hotel Ibis Bandung Trans Studio
9. Hasil Kegiatan :

a. Minggu, 18 Juni 2023

Berangkat dari Kota Palangka Raya ke Jakarta menggunakan pesawat pada pukul 07.00 WIB dan tiba pukul 08.35 WIB. Dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Bandung pada pukul 10.00 WIB dan tiba di Hotel Ibis Trans Studio pada pukul 13.30 WIB.

b. Senin, 19 Juni 2023

Menghadiri Kaji Banding ke PPID Utama Jawa Barat di Gedung Sate pada pukul 09.00 WIB. Paparan dari Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwardi, M.Si, jika 70% peserta yang hadir pada kegiatan kaji banding ini dapat

mengimplementasikan di instansi masing-masing, maka kemungkinan dalam 6 (enam) bulan ke depan Provinsi Kalimantan Tengah dapat mendekati peringkat Provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini sudah mendapat 519 penghargaan.

Narasumber 1: Ketua Tim PPID Diskominfo Jawa Barat, Yulia Susanti.

Saat ini Jabar Digital Service (JDS), dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Jawa Barat.

Strategi dalam meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik diantaranya : Penguatan PPID melalui rapat koordinasi, bimtek, workshop, uji konsekuensi, fasilitasi sengketa informasi publik, advokasi dan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM PPID di perangkat daerah dan Kabupaten Kota serta laporan harian kepada pimpinan.

Meningkatkan pelayanan informasi ramah disabilitas (fasilitas *guiding block*, *ramp*, tempat parkir, toilet dan tempat pelayanan khusus disabilitas) serta pengembangan aplikasi Sivotun Jabar (Sistem Informasi Voice Over Tunanetra).

Program strategis Diskominfo Jawa Barat tahun 2022 diantaranya :

- Sapawarga : wadah pengumpulan sampai pengolahan data penerima bansos provinsi agar terlihat transparan dan akuntabel.
- Jabar Saber Hoaks : Kanal aduan *Jabar Quick Response* (JQR) sebagai wadah aduan kemanusiaan masyarakat Jawa Barat.
- Media Sosial : Humasjabar dan Jabarprov.go.id (Aplikasi PPID Utama) untuk memudahkan masyarakat memohon informasi tentang tata kelola.
- Ekosistem Data Jabar : Satu data jabar → Internal.
Open data → transparansi data dan informasi publik.
Satu Peta Jabar → Publikasi dan Data Geospasial.

PPID Jawa Barat → terdapat 46 Perangkat Daerah, 22 BUMD dan 27 Kabupaten/Kota.

PPID Jawa Barat mendapatkan peringkat I → 84,43 dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

IKIP 2022 → 81,93.

Upaya yang dilakukan oleh PPID Jabar dengan sering melakukan penguatan PPID baik secara online maupun offline, advokasi dan pembinaan.

Dalam 1 bulan, 2 minggu dilakukan penguatan dan pendampingan PPID di Kabupaten/Kota dan 2 minggu dilakukan penguatan dan pendampingan PPID di Perangkat Daerah.

Melaksanakan demo handling sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Narasumber 2 : Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Bandung, Sri Lestari.

Standar Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Bandung.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

Sarana dan Prasarana PPID :

-Media daring/online : website bandungkab.go.id sebagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bandung dengan portal layanan publik, administrasi pemerintahan, PPID, JDIH, perizinan, pengaduan, statistik, website OPD, seputra desa, UMKM, wisata, e-katalog dan LPSE.

Website ppid.bandungkab.go.id sebagai sistem pengembangan informasi dan dokumentasi dalam penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat dan mudah dengan fitur permohonan informasi dan penyediaan informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Website ini menyediakan Informasi PPID pemerintah Kabupaten Bandung dan 78 PPID Pelaksana.

- Media Penyiaran (Radio Kandaga)
- Publikasi informasi melalui videotron, baliho, spanduk, banner dan papan pengumuman.
- Menerapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik (berdasarkan DIP Perangkat Daerah).
- Mengikuti monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP Tingkat provinsi Jawa Barat.
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP terhadap 76 PPID pelaksana se Kabupaten Bandung setiap 1 tahun.
- Melaksanakan inisiasi pembentukan PPID desa dan PPID sekolah.
- Pelaksanaan PPID Kabupaten Bandung : Rapat koordinasi implementasi keterbukaan informasi publik dengan PPID Pelaksana Kabupaten Bandung.

Menyusun laporan PPID & menyampaikan ke Komisi Informasi agar PPID pelaksana difasilitasi.

Komisi informasi melakukan monitoring.

2023 → PPID Pelaksana diberi no urut berdasarkan paling cepat diterima. Akan diberikan warna merah untuk yang tidak ikut agar memacu PPIDnya.

Narasumber 3 : Sekretaris Badan Pendapatan Jawa Barat, Maulana Indra Wibawa, S.H., M.Si.

Tax Center Inovasi dan Digitalisasi Layanan Informasi Publik Bapenda Jabar.

Visi : *Smart tax for smart people* (Pengelolaan pajak yang cerdas untuk membangun masyarakat cerdas).

6 (enam) unggulan :

1. *Tax Awareness*

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lapisan masyarakat.

2. *Tax Appreciation*

Upaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga menjadi role model bagi masyarakat.

3. *Tax Center*

Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi.

4. *Tax Integration*

Upaya kolaborasi provinsi Jabar dengan pusat, kab/kota dan stakeholder pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan analisis dan supervisi.

5. *New Sipandu*

Upaya pengelolaan data dan analisis insight pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan *artificial intelligence*.

6. *New Sambara*

Inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang berupa aplikasi smartphone berbasis android dan iOs. Aplikasi ini juga dapat mempermudah pengecekan informasi kendaraan serta pembayaran pajak.

Prakarsa :

1. *Voice*
2. *Tect*
3. *Social media*
4. *Website*
5. *Live Agent*

• IT

- *Call center*
- *WA ChatBot*
- *Push Notification*
- *WA Blast*
- *Omni Chanel*
- Aplikasi PPID Beta Version

Website, videotron, sosial media.

- Non IT
 - Kurikulum pajak
 - Sosialisasi mitra
 - Sosialisasi industri
 - Sosialisasi tokoh masyarakat
 - Sosialisasi sekolah

Spanduk, baliho, flyer, poster.

- Aksesibilitas
 - Layanan bahasa isyarat
 - Layanan ruang dan fasilitas difabel
 - Layanan formulir PPID braile.

Rekapitulasi permohonan informasi tahun 2022, dari 110 permohonan, 106 dikabulkan dan 4 ditolak. 1 (satu) hari rata-rata dijawab.

c. Selasa, 20 Juni 2023

Rapat Koordinasi

Saat ini, PPID Kalteng berada di peringkat 11, harapannya setelah adanya kaji banding ini bisa naik peringkat.

Sri Suwanto (Asisten 3 Provinsi Kalimantan Tengah)

Asesor dari Kabupaten Sumedang → tidak ada inflasi saat ini PPID no 1.

Sistem digital : 1. Apa yang dibutuhkan dan 2. Siapa yang ditunjuk.

Kabupaten/Kota kalau bisa mengikuti supervisi konsultan dari Sumedang.

Menjadi pioner/trigger → Melobby pimpinan dengan berbagai usaha yang santun.

Komisi Informasi

Monitoring dan evaluasi → 2022 dilaksanakan secara manual.

2023 → dilakukan e-monev

1. PPID dibentuk dan dibeahi
2. Persiapan operator
3. Memiliki akun

Parameter :

- 1 Sarana dan prasarana. Desk layanan dipersiapkan, ruang PPID harus terlihat dari depan.
- 2 Kualitas informasi, mutu berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian.

- 3 Jenis informasi → informasi terbuka.
- 4 Komitmen organisasi → dukungan terhadap keterbukaan meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi.
- 5 Digitalisasi → proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas informasi publik.
- 6 Inovasi & strategi → digital dan non digital terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Kepala Diskominfoantik Kalimantan Tengah

Penguatan kelembagaan.

SDM, Sarana dan Prasarana, DIP serta layanan PPID di provinsi Kalimantan Tengah.

Informatif di peringkat 11.

Kota Palangka Raya →2021-2022 penghargaan informatif.

Aplikasi saat ini belum terintegrasi dan masih dalam pengembangan.

d. Rabu, 21 Juni 2023

Kembali ke Jakarta

Bukit Rawi, 26 Juni 2023

Yang Membuat Laporan,

1. Anita Tristya Wenni, SH.,MA.....

2. Rahma Noor Laila, S.Psi

Dokumentasi :



